KINERJA PEMERINTAH YANG DIPERTANYAKAN

Oleh : Nina Widowati

Abstract:
Half of the 5-year period of the Government under Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla has been carried out. There are many problems that have to be resolved by the president and his ministers. The performance of the government always becomes public debate. Bureaucracy pathology is a government's homework that should be accounted for the public. In line with this condition, it needs transparency and accountability of the government in order to bring about the change of bureaucracy behaviour.

Keywords : performance, transparency accountability, and change

A. PENDAHULUAN

Dua setengah tahun sudah perjalanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla. Banyaknya pekerjaan rumah yang sangat kompleks tentu saja tidak dapat diselesaikan dengan sekejap mata seperti membalikkan telapak tangan. Memang tidak mudah mengurai satu persatu permasalahan di negara kita. Dari masalah kemiskinan, pengangguran, pelayanan, sampai dengan masalah korupsi yang sangat marak diulas di berbagai media massa.

Organisasi publik (pemerintah) pada dasarnya merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung. Kasus merebaknya berbagai penyakit (busung lapar, flu burung, demam berdarah) di beberapa daerah, demonstrasi para buruh, antrean panjang untuk mendapatkan minyak tanah dan gas elpiji, melambungnya harga sembako, lambatnya penanganan bencana alam sampai dengan proses pengurusan berbagai perijinan yang lamban merupakan sebagian protret dari berbagai kinerja pemerintah yang dinilai masih lemah dalam penyediaan pelayanan kepada publiknya.

Kondisi di atas tentunya tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, oleh karena itu upaya pemerintah untuk mereformasi sistem penyelenggaraan pemerintah terus dilakukan melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah perbaikan penyelenggaraan pemerintah. Walaupun telah ada perubahan, namun itu belum cukup memberikan kepuasan pada masyarakat. Kalau kita cermati bersama, pengelolaan negara bukan saja dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, namun mereka dibantu oleh beberapa menteri sampai jajaran yang terbawah. Kinerja pemerintah yang kita pertanyakan seharusnyalah sampai juga pada jajaran yang paling bawah.

Budaya organisasi memiliki peran yang sangat strategis untuk meraih kesuksesan dalam membangun kinerja organisasi pemerintahan. Namun sayangnya peran strategis budaya organisasi ini kurang disadari dan dipahami oleh kebanyakan pelaku organisasi di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan misalnya, yang banyak menimbulkan demonstrasi buruh, pemogokan dan aksi-aksi destruktif karyawan serta banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), menunjukkan bahwa kesadaran manajemen terhadap peran strategis dan implementasi budaya organisasi dalam organisasi atau perusahaan masih sangat lemah.

Masalah-masalah di atas tentu saja perlu perhatian yang khusus dan butuh waktu yang lama untuk mengadakan perubahan.. Presiden SBY – Kalla pernah menjanjikan perubahan semasa kampanye mereka. Yang perlu kita pertanyakan di sini adalah sudah sejauh mana perubahan itu terjadi?. Perubahan yang dimaksud meliputi perubahan dalam perilaku, perubahan dalam sistem nilai, perubahan dalam sistem kerja, perubahan dalam peralatan yang digunakan serta perubahan dalam bersikap. Walaupun belum tentu bahwa semua perubahan pasti menimbulkan hal yang positif, namun paling tidak perubahan yang dilakukan diarahkan pada keadaan yang lebih baik

**) Staff Pengajar Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP*

dibandingkan keadaan sebelumnya. Untuk itu masalah kinerja birokrasi perlu dikaji dalam upaya perubahan ke arah yang diinginkan.

B. APA YANG DIMAKSUD DENGAN KINERJA ?

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendikiawan sebagai penampilan, ujuk kerja atau prestasi (T. Keban, 2004 : 191) Kinerja oleh Lembaga Administrasi Negara (2000 : 3) diartikan sebagai "gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran , tujuan, misi, visi organisasi"

Di Indonesia, kinerja seorang pegawai negeri sipil sering dikaitkan dengan pelaksanaan pekerjaan dibanding hasil pekerjaan. Oleh karena pemahaman kinerja lebih ditekankan pada pelaksanaan pekerjaan, maka telah ditetapkan 8 unsur atau aspek kinerja yang harus dinilai, seperti : kesetiaan, prestasi, ketaatan, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Pencapaian hasil ini sebenarnya dapat dinilai menurut perilaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu atau kinerja individu, oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melakukan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi atau visi institusi. Sedangkan kinerja program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut.

Dalam konteks manajemen publik, penilaian kinerja harus dilihat sebagai upaya yang berkesinambungan dalam rangka memperbaiki organisasi publik. Dasar kinerja tidak semata-mata pada proses yang ditempuh, perlakuan kepada bawahan atau kepada masyarakat dan bagaimana akuntabilitas berjalan dalam organisasi, tetapi lebih luas lagi yaitu berkenaan dengan kualitas pelayanan, keterkaitan dengan misi dan visi organisasi, kesesuaian apa yang dikerjakan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan sampai sejauh suatu organisasi publik telah belajar memecahkan masalah dan memperbaiki situasi yang dihadapinya. Untuk itu perlu adanya kesepakatan tentang tujuan yang *hendak* dicapai agar bisa dilihat derajad kemajuan yang *telah* dicapai birokrasi publik dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam konteks ini, *good governance* nampaknya menjadi syarat utama penilaian kinerja di masa mendatang, yang tidak semata mengatur perilaku birokrat, tetapi juga organisasi itu sendiri.

Untuk mengukur kinerja, telah dikembangkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yang menilai perilaku (pendekatan perilaku) dan pendekatan yang menilai hasil dan manfaat yang diberikan (pendekatan hasil). Keduanya sama-sama penting dalam rangka memperbaiki dan merubah organisasi.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan padanya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja merupakan analisis dan intepretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, dengan membandingkan antara kemajuan yang telah dicapai dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan evaluasi kinerja diperlukan indikator kinerja yang bersifat kualitatif dan atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar menilai tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

C. BAGAIMANA KINERJA PEMERINTAH ?

Di Indonesia, hak warga untuk mengetahui apa yang terjadi dalam birokrasi administrasi publik seringkali masih sangat terbatas. Buruknya transparansi pemerintahan di Indonesia menunjukkan bahwa *good governance* masih jauh dari kehidupan pemerintahan sehari-hari, di mana transparansi mempunyai keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik.

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat dengan mudah diketahui oleh para pengguna

yang membutuhkan. Apabila segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan, cara pelayanan serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh pengguna, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.

Untuk mengukur transparansi pelayanan publik, setidaknya ada tiga indikator yang dapat digunakan. *Indikator pertama,* adalah mengukur tingkat keterbukaan penyelenggaraan pelayanan publik dengan menginformasikan semua persyaratan seperti biaya, waktu yang dibutuhkan serta prosedur pelayanannya. Pada kenyataan di lapangan, banyak dari masyarakat kita yang tidak bisa membaca, memahami bahkan kurang memperharikan papan pengumuman yang diletakkan di tempat yang kurang strategis. Untuk itulah maka petugas perlu menjelaskan kembali pada pengguna dalam melakukan proses pelayanan. *Indikator kedua*, mudah dipahami oleh pengguna. Menjelaskan kepada pengguna yang membutuhkan informasi dan penjelasan mengenai prosedur dan praktik pelayanan merupakan bagian konsep transparansi pelayanan. Seringkali prosedur dan peraturan mengenai penyelenggaraan pelayanan tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan pengguna, tetapi semata-mata untuk kepentingan pemerintah dan para pejabat. Akibatnya prosedur dan peraturan pelayanan sering tidak dipahami oleh para penggunanya. *Indikator ketiga* adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai aspek penyelenggaraan pelayanan. Semakin mudah memperoleh informasi, maka berarti transparansi terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Transparansi memiliki kontribusi penting dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang masih banyak terjadi di pemerintahan SBY. Untuk itu SBY tidak mau mengeluarkan surat sakti kepada siapapun, karena menurut beliau surat sakti hanya akan menimbulkan KKN baru. Walaupun beliau mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi, namun kiranya pelaksanaan di lapangan tidak semudah yang diharapkan. Korupsi terlanjur terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari pegawai tingkat bawah sampai pimpinan tertinggi. Pegawai yang melakukan korupsi mungkin mula-mula didorong oleh kebutuhan perut karena gaji pegawai negeri yang kecil. Namun karena kurangnya kontrol atasan dan diamnya masyarakat sekitar, maka korupsi kecil yang dilakukan akan menjebak seseorang pada korupsi yang semakin besar. Contoh lain kurang transparannya pemerintah juga tercermin pada penyelidikan di kepolisian dan kejaksaan. Beberapa kasus bersifat sangat tertutup dan tidak mudah terpantau publik. Tidak heran bila oknum-oknum kepolisian dan kejaksaan sering memainkan kasus hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Penentuan dihentikan atau diteruskannya suatu kasus hukum sering tidak jelas kriterianya.

Tuntutan untuk membangun transparansi dalam pemerintahan saat ini semakin menguat sejalan keinginan mewujudkan *good governance* seperti yang diinginkan oleh presiden kita SBY. Setiap kali orang membahas tentang praktik *good governance* selalu dikaitkan dengan transparansi. Oleh karena itulah tidak mengherankan bila tekanan terhadap pemerintah untuk segera memperbaiki transparansi dalam pemerintahan menjadi semakin kuat.

Dalam pengertian yang diberikan oleh UNDP, *good governance* merupakan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara state (negara), private sector (sektor swasta) dan *society* (masyarakat) (Erwan , dalam Joko Widodo : 2001 : 24) Berdasarkan konsep di atas, UNDP mengajukan karakteristik *good governance* sebagai berikut : *participation, rule of low, transparancy, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability dan strategic vision.* Adopsi terhadap konsep *good governance* di atas tentu akan memberikan kontribusi dalam proses perubahan kinerja pemerintahan.

Good governance bagaimanapun juga harus kita dukung bersama, agar masyarakat semakin merasakan perubahan sesuai yang diinginkan dan bukan sekedar mimpi. Tanda-tanda ke arah *good governance* saat ini sudah mulai tampak karena menguatnya masyarakat sipil. Kalau kita mau jujur, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sudah semakin membaik dibanding satu dasawarsa yang lalu. Angka buta aksara masyarakat sudah mengalami penurunan. Apalagi baru-baru ini pemerintah sedang menggalakkan pemberantasan buta aksara melalui program Kuliah Kerja Nyata di berbagai Perguruan Tinggi. Kondisi pendidikan yang semakin tinggi ini berimbas pada terbukanya kesadaran yang semakin tinggi terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara.

Selain dari transparansi, akuntabilitas juga

dibutuhkan agar dapat mewujudkan suatu perubahan perilaku birokrasi. Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. (LAN,2000:23) Akuntabilitas juga didefinisikan sebagai "derajad yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah" (Agus Dwiyanto, 2006 : 99)

Ada dua bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas implisit dan akuntabilitas implisit. Akuntabilitas eksplisit adalah pertanggungjawaban seorang pejabat atau pegawai pemerintah ketika dia diharuskan menjawab atau menanggung konsekuensi dari cara-cara yang mereka gunakan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Sedangkan akuntabilitas implisit berarti bahwa setiap pejabat atau pegawai pemerintah secara implisit bertanggung jawab atas setiap kebijakan, tindakan atau proses yang dilaksanakan, termasuk bertanggung jawab terhadap penyakit birokrasi yang banyak dikeluhkan masyarakat, yaitu praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Seseorang pegawai negeri dianggap tidak akuntabel dan kurup apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Kolusi atau penyogokan merupakan tindakan korupsi yang bersifat eksternal, yaitu tindakan pemberian yang dimaksudkan mempengaruhi obyektivitas penyuap. Adapun nepotisme adalah kecenderungan pengambilan keputusan yang bukan berdasarkan pada pertimbangan obyektif, rasional tetapi didasarkan pada famili dan kekerabatan.

Akuntabilitas dibedakan beberapa macam tipe, yaitu akuntabilitas politik, akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas hukum. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas sangat terkait dengan pengendalian atau kontrol. Pengendalian tidak akan dapat berjalan apabila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik pula. Demikian pula sebaliknya, akuntabilitas akan sulit diwujudkan manakala tidak ada pengendalian yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Membahas tentang kinerja pemerintah SBY-Kalla, nampaknya mereka dinilai belum bisa bertindak nyata untuk mengakselerasi kinerja pemerintahannya dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Belum lagi kinerja para menterinya yang kurang memberi kepuasan pada publik. Adanya *reshuffle* kabinet yang baru saja dilaksanakan SBY tidak menjanjikan kinerja pemerintah menjadi lebih baik, kalau mengingat adanya pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk para menterinya.

Keadaan senyatanya di lapangan masih sangat memprihatinkan. Lihat saja kasus Lapindo yang tak kunjung terselesaikan sampai saat ini, juga peristiwa gempa bumi yang menimpa Bantul dan sekitarnya. Masalah gempa belum tertangani dengan tuntas, karena pemerintah belum membayar tunggakan biaya pengobatan korban gempa sebesar 24 milyar bagi 13 rumah sakit di Provinsi Yogyakarta (Kompas 10 Mei 2007), padahal gempa sudah berlangsung hampir satu tahun. Janji tinggallah janji. Sejak awal telah diputuskan bahwa korban gempa adalah tanggung jawab pemerintah pusat, namun toh sampai saat ini belum terselesaikan juga.

Persoalan kesehatan yang bermunculan, wabah penyakit demam berdarah misalnya, hampir setiap hari kita dengar dan kita baca di media massa dan terjadi di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana peran pemerintah, hal ini perlu kita pertanyakan karena penanganan yang terlihat lamban.

Kinerja pemerintah yang masih belum memuaskan masyarakat terlihat dari beberapa kecelakaan transpotasi, terutama kereta api yang tergolong sering terjadi. Pemerintah seolah-olah kurang bertindak cepat, misalnya dengan mengganti bantalan rel yang relatif sudah usang dan sudah tua. Kita akan sabar menunggu, apakah dengan digantinya Hatta Rajasa dengan Jusman Syafi Djamal lantas terjadi perbaikan di bidang manajemen PT KAI, walaupun ada dugaan dari para pengamat politik bahwa *reshuffle* hanyalah langkah SBY untuk mengakomodasikan kepentingan partai politik, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan peningkatan kinerja.

Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan melihat tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya biaya hidup, biaya pendidikan yang tinggi, dan lain-lain menjadi masalah masyarakat yang tidak asing lagi. Mudah-mudahan itikad baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilandasi dengan penghayatan dan kesadaran mendalam

tentang penderitaan masyarakat miskin, dan bukan hanya retorika politik guna pencitraan pemerintah yang prorakyat. Tragisnya lagi, justru keinginan pemerintah untuk membantu bahkan menimbulkan fenomena baru, yaitu dengan masyarakat yang "memiskinkan diri" atau rela dianggap miskin. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya surat miskin, dan distribusi raskin yang disalahgunakan dan salah sasaran. Evaluasi dari pemerintah untuk pemberian bantuanpun tidak pernah dilaksanakan. Yang ada hanya saling menyalahkan antara aparat setempat dan BPS (Badan Pusat Statistik)

D. PENINGKATAN KINERJA MELALUI PERUBAHAN

Adanya perombakan kabinet diharapkan dapat membawa perubahan kinerja, demikian kira-kira yang diharapkan oleh masyarakat kita. Bahkan SBY pernah berjanji bahwa beliau tidak akan pernah memberikan surat sakti kepada siappun. Beliau bahkan menyatakan tidak ragu-ragu untuk menindak koruptor serta membuat keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mengadakan perlawanan bagi mereka yang tidak mau berubah.

Kita tahu betul bahwa seseorang sering alergi terhadap perubahan. Bagi mereka yang telah terbiasa hidup dalam lingkungan yang enak, pasti berat untuk meninggalkan keenakannya itu. Terdapat beberapa faktor pendorong bagi timbulnya resistensi terhadap perubahan yang terjadi, yaitu antara lain karena : ketidakamanan ekonomis, ketakutan atas hal yang tidak diketahui, ancaman terhadap hubungan sosial, kebiasaan, proses informasi selektif, ketakutan akan kegagalan, dan masih banyak lagi.

Suatu perubahan mempengaruhi perasaan keamanan, terutama bagi beberapa orang yang sangat memerlukan jaminan keamanan. Orang yang kinerjanya rendah dan tidak kompetitif, cenderung menolak perubahan. Mereka khawatir bahwa perubahan dapat menimbulkan ketidakpastian dan berdampak negatif terhadap kelangsungan masa depannya. Setiap perubahan memiliki potensi bagi seseorang untuk kehilanagn pekerjaan atau penurunan pendapatannya. Dengan demikian, suatu perubahan dapat menimbulkan ketidakamanan secfara ekonomis pada seseorang.

Suatu perubahan juga merupakan gangguan terhadap pola yang sudah mapan dan menciptakan kondisi yang tidak biasa. Karenanya perubahan merupakan sesuatu yang sering ditolak, karena orang takut menghadapi konsekuensi dari perubahan yang wujudnya dalam banyak hal belum jelas. Perubahan yang dapat mengakibatkan perpindahan ke unit kerja yang lain yang belum dikenal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian, karena menukar dari apa yang sudah diketahui ke sesuatu yang belum dikenal sehingga menyebabkan kekhawatiran dan ketidakamanan.

Perubahan organisasi sering pula ditakutkan mengancam integritas persahabatan kelompok yang memberikan penghargaan sosial yang sangat berharga. Suatu perubahan dapat merusak tatanan hubungan sosial yang tidak diinginkan. Kekhawatiran tersebut menyebabkan status quo seringkali dipertahankan dalam perubahan.

Perubahan cara mengerjakan pekerjaan memberikan tantangan untuk mengembangkan ketrampilan pekerjaan, yang berakibat pada keharusan untuk merubah kebiasaan. Sementara itu, merubah kebiasaan dirasakan sebagai ketidaknyamanan, sehingga cenderung menimbulkan resistensi.

Seseorang atau individu seringkali membentuk dunianya melalui persepsinya. Sekali dibangun kemapanan, maka mereka akan mempertahankan dunia yang mereka bangun. Mereka hanya ingin mendengar informasi yang sesuai menurut persepsinya. Sikap demikian sangat berbahaya, karena orang cenderung merasa dirinya sudah benar, dan terlalu bangga dengan apa yang dicapai.

Seseorang sering takut terhadap suatu kegagalan. Perubahan pada cara melakukan pekerjaan akan menyebabkan seseorang meragukan kapabilitasnya. Keraguan ini mengikis percaya diri serta melumpuhkan pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Ketakutan akan kegagalan dalam melakukan pekerjaan baru dapat menurunkan kinerja seseorang, yang berakibat pada menurunnya kinerja organisasi.

Keadaan yang diuraikan di atas, membawa pada suatu kesimpulan terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, terutama kinerja para menteri yang menjadi roda penggerak pemerintahan. Apalagi ditambah dengan opini masyarakat tentang cara SBY memimpin kabinetnya yang sangat hati-hati yang dianggap sebagian kalangan menunjukkan kurang tegasnya presiden dalam mengambil resiko atas keputusan yang dibuatnya.

E. PENUTUP

Walaupun tingkat kinerja pemerintah dipandang belum optimal, namun kita masih

berharap di sisa pemerintahan SBY yang masih dua setengah tahun lagi banyak kondisi yang dapat dirubah dan diperbaiki. Dukungan terhadap SBY pun masih kuat, walaupun popularitasnya cenderung menurun karena adanya berbagai masalah di negara kita yang belum tuntas.

Keinginan masyarakat terhadap perubahan tidaklah hanya sebatas angan-angan, tetapi ingin menjadi suatu kenyataan. Masalah yang belum sepenuhnya tersentuh hukum, seperti beberapa kasus korupsi misalnya serta bidang lainnya sangat diharapkan segera ditindaklanjuti, sehingga cita-cita untuk mewujudkan *good governance* segera terealisir.

F. REFERENSI

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2006

Joko Widodo, *Good Governance*, Surabaya, Penerbit Insan Cendekia, 2001

Yeremias T. Keban, Memahami *Good Governance*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2004

Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Konsep. Teori dan Isu, Yogyakarta, Penerbit Gava Media, 2004

Wibowo, , *Managing Change*, Jakarta, Alfabeta, 2006

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 2000

Media Indonesia, 10 Mei 2007. *Kemiskinan dalam Relasi Penanda dan Pertanda*, hal 23

Kompas, Jumat, 20 April 2007, *Populeritas Yudhoyono Cenderung Turun*, Hal. 5

Kompas, Senin, 23 April 2007, *Kinerja Pemerintahan dalam Titik Stagnasi*, hal 5

Kompas, Kamis, 10 Mei 2007, *Klaim Gempa Belum Dibayar*, hal 23